

PENATAAN KELEMBAGAAN BUMDES BERBASIS PARIWISATA

Muchamad Zaenuri, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Iqbal
Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-Mail: iqbalmuh310@gmail.com

<https://doi.org/10.24071/aa.v2i2.2544>

Abstract

The Main Problem In Bumdes Management In Donoharjo Village Is The Lack Of Optimal Management Of The Organization Following The Principles Of Good Organizational Governance. Specifically, Issues In The Management Of Bumdes In Donoharjo Village Include 1) The Absence Of A Standard Reference Or Guideline For Professionally Managing The Jetis Suruh Reservoir; 2) There Is No Clear Organizational Structure; 3) The Lack Of Basic Tasks And Functions For Managers; 4) There Is No Sop To Follow Up On Various Work Programs Related To The Jetis Suruh Dam; 5) The Unavailability Of Human Resources Capable Of Moving Bumdes Organizations That Refer To Good Governance. Based On The Identification Of The Problem, The Following Activities Were Carried Out: Training On The Preparation Of Governance Guidelines, Focus Group Discussion On The Formation Of Auth And Jobs Descriptive, Fgd On The Arrangement Of Governance Implementation Materials, 5. Training For Tour Guides And Management Assistance. The Results Of These Activities Make The Governance Of Bumdes Desa Donoharjo More Effective And Efficient.

Key Word: Bumdes Donoharjo Sleman, institutional

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata sangat penting untuk dilakukan mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah kunjungan wisata nomer 2 setelah Bali. Kabupaten Sleman yang mempunyai letak geografis di sebelah utara DIY mempunyai berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Desa Donoharjo. Desa ini mempunyai potensi wisata berupa embung yang sudah menarik wisatawan domestik. Pengembangan embung tersebut sebagai obyek wisata tentu saja membantu masyarakat dalam pembukaan lapangan kerja baru dan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Wisata yang bersifat konvensional seperti wisata alam, buatan dan budaya dianggap sudah biasa. Perlu ada wisata alternatif yang bersifat edukatif dan meningkatkan kompetensi para wisatawan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Tuntutan terhadap wisata alternatif ini disambut baik oleh masyarakat salah satunya dengan membuat desa wisata.

Apabila dilihat dari struktur pekerjaan masyarakat, masyarakat masih memungkinkan untuk menyiapkan tenaga dalam rangka mendukung obyek wisata. Terdapat potensi berupa masyarakat yang bekerja di sektor swasta maupun jasa yang begitu besar, selengkapya bisa dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Pekerjaan pendudukan desa Donoharjo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	537
2	Pengrajin Industri	37
3	Buruh Tani	334
4	Industri	17
5	Bangunan	170
6	Perdagangan	8
7	Pengangkutan	20
8	PNS	207
9	TNI	16
10	POLRI	12
11	Jasa	225
12	Pegawai Swasta	702
13	Wiraswasta	173
14	Lainnya	451
15	Jumlah	2909

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Donoharjo, 2017

Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata mendapat perhatian yang serius bagi berbagai kalangan. Secara khusus kepala desa Donoharjo memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengelola obyek wisata embung tersebut. Sebagaimana diperoleh hasil dari wawancara berikut ini:

“Kami, jajaran pemerintah desa Donoharjo mendukung sekali apabila embung Suruh ini dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang dapat menarik para wisatawan. Sepenuhnya saya yakin kalau dikembangkan pasti masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaatnya. Minimal bisa jualan atau memberikan pelayanan jasa yang mendukung pariwisata. Dan yang lebih baik lagi apabila dikelola secara profesional, dengan menggunakan prinsip-prinsip organisasi yang moderen. Saya memberi tawaran bagaimana kalau dibentuk badan usaha milik desa (BUMDes) yang diawali dengan mengurus obyek wisata embung Suruh tersebut” (Wawancara, 10 Juni 2018).

Pengembangan suatu desa menjadi desa yang mampu mengelola obyek daya tarik wisata (ODTW) perlu diawali dengan identifikasi potensi atraksi wisata di desa tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan dan obyek wisata yang bisa dikembangkan dalam suatu desa bisa mulai dari: 1) identifikasi potensi wisata yang ada, 2) analisis pengelolaan obyek wisata, 3) manajemen ODTW, 4) pemasaran dan promosi wisata, dan 5) penataan kelembagaan obyek wisata.

Keberadaan desa wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman menjadi alternatif bagi wisatawan yang berminat pada wisata yang memiliki nilai edukasi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dan ditindaklanjuti dengan Renstra Disbudpar Sleman, desa wisata memperoleh perhatian yang serius antara lain dengan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), inovasi pelayanan maupun pemasaran dan sebagainya.

Permasalahan Mitra

Dari beberapa desa yang mempunyai potensi dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata yang ada di Kabupaten Sleman, Desa Donoharjo yang berbasis pada keunggulan wisata buatan, yaitu berupa embung, diyakini oleh perangkat desa dan masyarakat mampu menjadi alternatif obyek wisata lainnya di Sleman.

Pada hari minggu atau hari libur nasional embung Suruh sudah banyak dikunjungi berbagai wisatawan bahkan dijadikan tempat kegiatan outbound, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Wisatawan Melakukan Kegiatan Outbound

Sumber: <https://www.google.com/search?q=embung+suruh+donoharjo+sleman&tbm>

Obyek wisata embung Jetis Suruh yang menjadi potensi wisata Desa Donoharjo selama ini belum ada lembaga yang mengelola. Pemerintah desa dan masyarakat masih mencari bentuk dan format pengelolaannya. Pada masa sekarang ini sudah mulai diinisiasi BUMDes yang direncanakan untuk mengelola embung tersebut. Rekrutmen SDM dimulai dan perlu juga disiapkan kelembagaan yang solid agar nantinya mampu mengelola embung Jetis Suruh secara profesional. Sebagaimana hasil wawancara dengan Carik Desa Donoharjo berikut ini:

Kami pemerintah desa Donoharjo telah melakukan upaya untuk membentuk BUMDes, sampai sekarang ini BUMDes telah sampai pada tataran rekrutmen SDM, moga aja dapat diperoleh SDM yang mumpuni sehingga mampu menjadi pionir bagi usaha wisata ini, yang disini masih merupakan barang baru. Saya mempunyai pandangan mestinya ada tata kelola yang baik agar organisasi BUMDes ini mampu menjawab tantangan kedepannya. Dan bisa melakukan perubahan cara berfikir yang tadinya masih bersifat pertanian berubah menjadi sektor jasa wisata. (Wawancara, 10 Juni 2018)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Belum adanya acuan atau guideline yang baku untuk mengelola embung Jetis Suruh secara profesional.
2. Belum ada struktur organisasi yang jelas
3. Belum ada tugas pokok dan fungsi bagi pengelola
4. Belum ada SOP untuk menindaklanjuti berbagai program kerja yang berkaitan dengan embung Jetis Suruh
5. Belum tersedia SDM yang mampu menggerakkan organisasi BUMDes yang mengacu pada tata kelola yang baik.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan metode pendampingan, dimana pihak mitra diharapkan aktif melakukan kegiatan sementara pengabdian memberikan fasilitas dan transfer iptek kepada pihak mitra. Penentuan metode pelaksanaan dilakukan dengan melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana pengabdian dan kedua mitra.

Strategi yang dipakai dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan tahapan metode sebagai berikut: 1) Bidang **manajemen**, yaitu dengan penguatan kompetensi pengelola agar bisa mengelola BUMDes secara

profesional, 2) **Bidang produksi**, karena lembaga yang menjadi obyek pengabdian masyarakat adalah lembaga inisiasi BUMDes maka produksi yang dimaksud disini adalah penyediaan berbagai dokumen tata kelola dan pengelola yang mumpuni. Produk ini disusun dengan melalui *focus group discussion* (FGD) bersama-sama antara pelaksana pengabdian dengan mitra, dan 3) **Pemasaran**, dilakukan dengan melalui pembuatan brosur, materi di website obyek wisata embung Jetis Suruh. Metode yang dipakai dalam aspek pemasaran ini adalah melalui pendampingan pada pengelola agar mampu melakukan kegiatan pemasaran tersebut secara mandiri.

HASIL YANG DICAPAI

Dari program pengabdian ini dapat dihasilkan keluaran yang sesuai dengan proposal yang diajukan. Semua kegiatan terlaksana dengan membawa keluaran dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi BUMDes Desa Donoharjo. Deskripsi kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan Penyusunan Pedoman Tata Kelola

Untuk mengatasi permasalahan tata kelola organisasi dilakukan pelatihan tentang penyusunan tata kelola yang meliputi pembuatan panduan untuk menjadi pedoman bagi pengelola dalam melakukan tugasnya maupun dalam membuat program atau kegiatan. Panduan ini bersifat kumpulan instruksi yang mempunyai target atau sasaran secara jelas dan terukur.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan harus didukung oleh sumberdaya manusia yang cakap dan ditunjang oleh sarana yang memadai. Hal ini dilakukan agar peserta pelatihan dapat menyerap materi dan melakukan praktek sesuai dengan yang direncanakan. Efektifitas pelaksanaan pelatihan sangat didukung oleh pengelola pelatihan yang mampu menyediakan segala keperluan pelatihan.

Evaluasi pelatihan dilakukan agar pelatihan memang menghasilkan dampak yang sesuai dengan yang direncanakan. Kompetensi yang dihasilkan memang benar-benar dapat mendukung pekerjaannya dan membawa manfaat bagi kehidupannya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Donoharjo yang melibatkan pengelola BUMDes Desa Donoharjo. Pemberi materi kegiatan pelatihan ini adalah Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si dan Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP. sebagai pelaksana pengabdian masyarakat yang berpengalaman dalam tata kelola organisasi dan kelembagaan organisasi publik. Kegiatan yang diikuti oleh tim pengelola BUMDes Desa Donoharjo. Program ini berhasil memberikan dampak positif bagi keberlangsungan BUMDes Desa Donoharjo tersebut. Dampak positif yang paling menonjol adalah BUMDes Desa Donoharjo dapat menjalankan peran dan fungsi kelembagaannya dengan lebih efektif dan efisien. Gambar kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2 Pelatihan Penyusunan Pedoman Tata Kelola

Sumber: Dokumen Pribadi

1. *Focus Group Discussion* Penyusunan Tupoksi dan Job Deskripsi

Kegiatan ini dilakukan agar tercipta tata kelola organisasi yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi, perlu dibuat struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beserta job deskripsinya. Untuk menyusun dokumen tersebut dilaksanakan kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pengelola BUMDes dan beberapa perangkat desa yang berkaitan dengan BUMDes.

Penyusunan struktur organisasi yang berorientasi pada tantangan yang dihadapi oleh desa disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan dilakukan oleh para instruktur dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk merumuskannya. Di dalam FGD tersebut juga membahas mengenai desain organisasi dan tupoksi beserta job deskripsinya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 di Desa Donoharjo yang melibatkan pengelola BUMDes Desa Donoharjo. Pemberi materi kegiatan pelatihan ini adalah Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si dan Sri Handari, S.E., M.M sebagai akademisi dan praktisi yang telah memiliki banyak pengalaman dalam tata kelola organisasi publik. Kegiatan yang diikuti oleh tim pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Donoharjo ini berhasil memberikan dampak positif bagi tata kelola BUMDes di Desa Donoharjo tersebut. Dampak positif yang paling menonjol adalah BUMDes Desa Donoharjo dapat menjalankan peran dan fungsi kelembagaanya dengan lebih efektif, efisien dan sistematis. Gambar 3 menunjukkan kegiatan FGD dalam penyusunan tupoksi dan job deskripsi.



Gambar 3 Focus Group Discussion Penyusunan Tupoksi dan Job Deskripsi

Sumber: Dokumen Pribadi

FGD Penyusunan Bahan Implementasi Tata Kelola

Setelah dirumuskan pedoman tata kelola yang jelas. Langkah selanjutnya yaitu melakukan FGD agar tupoksi dapat berjalan dengan efektif yang berkenaan dengan implementasi dari tupoksi tersebut. Untuk berhasilnya implementasi tersebut dilakukan kegiatan fasilitasi dan sumberdaya yang cukup. Kegiatan ini meliputi FGD yang lebih operasional lagi dengan melalui praktek penanganan berbagai kegiatan yang bersifat administratif. Kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 FGD Penyusunan Bahan Implementasi Tata Kelola

Sumber: Dokumen Pribadi

Optimalisasi Media Promosi

Selama ini desa Donoharjo dalam melakukan promosi telah menggunakan website tetapi belum dipakai untuk penawaran berbagai aktifitas BUMDes yang berkaitan dengan pemanfaatan embung Jetis Suruh. Oleh karena itu perlu memasukkan paket pelatihan melalui website yang sudah ada. Promosi dengan menggunakan website memungkinkan dilakukan karena biaya yang dikeluarkan murah, namun yang menjadi sasaran adalah orang yang “melek” internet, sedangkan untuk khalayak umum belum kena.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut maka lebih baik dalam program ini dilakukan melalui surat langsung ke sasaran. Dari hasil wawancara dengan pengelola maka terdapat 500 kelompok yang potensial. Sehubungan dengan itu maka perlu dipersiapkan brosur dan surat yang dikirim langsung ke kelompok sasaran.

Dalam pelatihan ini dibantu oleh Dr. Aris Slamet Widodo, S.P., M.Sc untuk teknis pengoperasionalan. Kegiatan ini dapat dilihat dalam Gambar 5.



Gambar 5. Optimalisasi Media Promosi

Sumber: Dokumen Pribadi

Pelatihan Bagi Pemandu Wisata

Salah satu faktor keberhasilan dalam promosi wisata adalah tersedianya pemandu wisata yang handal untuk menawarkan obyek wisata yang ada. Untuk dapat diperoleh pemandu yang mampu untuk menyampaikan materi dari obyek wisata dan mempunyai kecakapan dalam berbicara diperlukan adanya training tersendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui kegiatan pelatihan yang aplikatif dengan melalui praktek langsung di lokasi obyek wisata. Kegiatan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Pelatihan Bagi Pemandu Pariwisata

Sumber: Dokumen Pribadi

Pendampingan Manajemen

Agar seluruh program yang telah disampaikan dapat terlaksana secara berkesinambungan maka diperlukan adanya pendampingan manajemen secara rutin. Pelaksana pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes. Pendampingan manajemen, kelembagaan dan SDM yang dilakukan yaitu mendampingi dalam hal :

1. Monitoring dalam melakukan pengelolaan organisasi.
2. Monitoring dalam mengelola obyek wisata
3. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan
4. Memberi umpan balik dalam setiap penyelenggaraan pelatihan
5. Membantu menyempurnakan tupoksi dan job deskripsi setelah diuji cobakan

Kegiatan move dan pendampingan ini dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Monev dan Pendampingan Manajemen

Sumber: Dokumen Pribadi

PEMBAHASAN

Semua kegiatan yang tergabung dalam program pengabdian masyarakat pengembangan BUMDes berbasis pariwisata telah dilaksanakan secara berurutan. Kegiatan pertama adalah Pelatihan Penyusunan Tata Kelola yang meliputi pembuatan panduan untuk menjadi pedoman bagi pengelola dalam melakukan tugasnya maupun dalam membuat program atau kegiatan. Panduan ini bersifat kumpulan instruksi yang mempunyai target atau sasaran secara jelas dan terukur.

Dari kegiatan tersebut pengelola BUMDes telah memahami tugas dan berbagai instruksi serta target yang jelas dan terukur. Dengan adanya pedoman

ini pengelola mampu untuk berbagi tugas di antara pengurus yang lain, tidak terjadi tumpang tindih tugas antara personil yang satu dengan yang lain. Dengan demikian penyelenggaraan organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah dapat diidentifikasi sistem tata kelola BUMDes maka kegiatan berikutnya adalah menjabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan job deskripsi yang diwadahi dalam struktur organisasi yang baku. Struktur organisasi yang dibentuk diarahkan untuk menghadapi tantangan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Desain organisasi yang dibentuk memegang prinsip miskin struktur kaya fungsi sehingga tidak rumit dalam pengambilan keputusan.

Setelah dirumuskan pedoman tata kelola yang jelas dan agar tupoksi dapat berjalan dengan efektif maka dilakukan FGD lanjutan yang berkenaan dengan implementasi dari tupoksi tersebut. Untuk berhasilnya implementasi tersebut dilakukan kegiatan fasilitasi dan sumberdaya yang cukup. Kegiatan ini meliputi FGD yang lebih operasional lagi dengan melalui praktek penanganan berbagai kegiatan yang bersifat administratif.

Selain didukung oleh SDM yang mumpuni dan praktek-praktek administratif juga perlu pengembangan media promosi baik itu secara konvensional maupun secara online. Pengembangan media promosi dilakukan dengan mengoptimalkan media website dan media sosial juga mengoptimalkan media konvensional seperti brosur yang dikirim ke 500 sasaran yang potensial.

Semua kegiatan tersebut dilakukan secara simultan dan melalui proses monitoring dan evaluasi secara rutin. Seluruh program dilaksanakan secara berkesinambungan dan di dampingi secara rutin oleh pelaksana pengabdian. Pelaksana pengabdian melakukan pendampingan manajemen, kelembagaan dan SDM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola BUMDes di Desa Donoharjo perlu dioptimalkan. Hasil dari pelatihan, FGD dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola BUMDes Desa Donoharjo. Demikian juga dengan menggunakan pemasaran dalam website serta diperkuat oleh brosur dan paket pelatihan yang diversifikatif semakin memantapkan dalam melakukan pengembangan Embung Jetis Suruh sebagai andalan objek wisata.

Saran

Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu pemasaran yang lebih masif melalui penyusunan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata dan melakukan benchmarking ke beberapa BUMDes yang sudah maju dengan berbasis pariwisata.

DAFTAR REFERENSI

- Davis, Eddie, 2005, *The Training Managers: A Handbook*, London: Kogan Page Limited.
- Merril, M.D., 2002, "First Principle of Instruction", *Educational Technology Research and Development*, 50 (3).
- Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2011-2015 Kabupaten Sleman
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2020 Desa Donoharjo

Sunaryo, Bambang, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Semua kegiatan yang tercantum dalam program pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan sukses karena bantuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

1. LP3M UMY yang telah memberikan fasilitas pendanaan dalam program pengabdian masyarakat ini.
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY yang telah memberikan fasilitas untuk pelatihan maupun magang para mitra dalam membuat berbagai desain promosi.
3. Pemerintah Desa Donoharjo yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini
4. Pengelola BUMDes Desa Donoharjo yang telah bersedia untuk berkolaborasi dalam program pengabdian masyarakat ini.
5. Para pematery dan pendamping yang ikut terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini